

PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, GOOD GOVERNANCE, DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD

NURJANAH
ISTIANINGSIH SASTRODIHARJO

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jl. Perjuangan No.81, Bekasi, Indonesia
istianingsih@dsn.ubharajaya.ac.id

Received: July 03, 2021; Revised: October 15, 2021; Accepted: October 31, 2021

Abstract: This research aims to determine the effect of Public Sector Accounting, Good Governance and financial management supervision on Fraud Prevention at the Rawalumbu District Office, Bekasi City. The independent variable consists of Public Sector Accounting, Good Governance, and Financial Management Supervision, and the dependent variable is Fraud Prevention. The sample used was 36 respondents of civil servants at the District Office of Rawalumbu Bekasi. This research is a quantitative research with hypothesis testing using multiple linear regression analysis method. The data used in this study are primary data obtained through distributing questionnaires to several civil servants at the Rawalumbu Bekasi sub-district office. The analysis tool used in this study uses data quality test analysis tools in the form of validity tests and reliability tests as well as hypothesis tests use Multiple Linear Regression. The results of the research show that Public Sector Accounting has a partial effect on Fraud prevention, Good Governance partially has an effect on Fraud Prevention, and financial management supervision has a partial effect on Fraud Prevention at the Rawalumbu District Office, Bekasi City.

Keywords: Public sector accounting, good governance, financial management supervision, fraud prevention

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntansi Sektor Publik, Good Governance dan pengawasan pengelolaan keuangan terhadap Pencegahan Fraud di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. Variabel independen terdiri dari Akuntansi Sektor Publik, Good Governance, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan, dan variabel dependen yaitu Pencegahan Fraud. Sampel yang digunakan 36 responden Pegawai Negeri Kantor Kecamatan Rawalumbu Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan uji hipotesis menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada beberapa pegawai negeri kantor kecamatan rawalumbu bekasi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat analisis uji kualitas data berupa uji validitas dan uji reabilitas serta uji hipotesis menggunakan Uji Regresi Linear Berganda. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Akuntansi Sektor Publik berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan Fraud, Good Governance berpengaruh secara parsial terhadap Pencegahan Fraud, dan pengawasan Pengelolaan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Pencegahan Fraud di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.

Kata kunci: Akuntansi sektor publik, good governance, pengawasan pengelolaan keuangan, pencegahan fraud

PENDAHULUAN

Pada era pemerintahan orde lama sekitar tahun 1950-an, sektor publik memegang peranan penting dalam perumusan dan pelaksanaan strategi pembangunan Indonesia. Dengan adanya akuntansi sektor publik yang terkait dengan pengelolaan ekonomi makro, membantu untuk mendokumentasikan rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan nasional (Sujarweni, 2021). Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai kegiatan jasa yang terdiri dari pencatatan, pengkategorian, dan pelaporan peristiwa atau transaksi ekonomi yang pada akhirnya akan menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak tertentu, dan sesuai untuk pengelolaan dana publik pada lembaga tingkat tinggi. Negara dan departemen-departemen bawahannya (Sujarweni, 2021).

Dalam penyajian laporan keuangan, akuntan sektor publik harus mampu menyajikan laporan keuangan secara akurat dan relevan untuk menghindari perilaku curang yang sangat merugikan pengguna laporan keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya yang ada di daerah. Namun nyatanya, implementasi kebijakan otonomi masih berdampak pada korupsi dan desentralisasi. Dampak ini tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga menyebar ke daerah-daerah di Indonesia. Sehingga berdampak pula pada good governance yang masih belum memenuhi harapan masyarakat. Walaupun terdapat perbedaan pemahaman tentang good governance, namun sebagian besar masyarakat berharap melalui penerapan

good governance akan mampu memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik (Dwiyanto, 2005; Agung & Mulyani, 2020).

Mantinaf menulis di situs resmi Inspektorat kabupaten Way Kanan bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk meminimalkan pencegahan kecurangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan pengendalian intern tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP adalah lembaga pemerintah dan lembaga audit intern pemerintah yang misinya melakukan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Tugas APIP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 ini adalah melakukan pengawasan intern yang didefinisikan sebagai seluruh proses kegiatan audit, 2 reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tetapi Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam survei Fraud Indonesia tahun 2019. hasil menunjukkan bahwa Fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi dengan persentase 64,4% dan jenis Fraud yang selanjutnya yaitu penyalahgunaan Aset/Kekayaan negara dan perusahaan dengan persentase 28,9% sedangkan Fraud atas penyalahgunaan Laporan keuangan mempunyai persentase 6,7%.

Tabel 1 Fraud yang paling merugikan di Indonesia.

No	Jenis Fraud	Jumlah kasus	Presentase
1	Fraud Laporan keuangan	22	9,2%
2	Korupsi	167	69,9%
3	Penyalahgunaan aset	50	20,9%

Sumber: *Accociation of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter (2019)*

Selain itu berdasarkan data yang dihimpun dari *Indonesian Corruption watch* menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 telah terjadi 1.218 perkara korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp. 56,7 triliun (*Indonesian Corruption watch*, 2020). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* tahun 2019 dan *Indonesian Corruption watch* tahun 2020 membuktikan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir fraud di Indonesia masih belum maksimal.

Kantor Kecamatan Rawalumbu pernah menjadi sorotan publik karena sempat terjadi kasus yang mengarah pada kecurangan yang dilakukan oleh mantan Camat Rawalumbu itu sendiri. Menurut merdeka.com (2014) telah terjadi kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan camat Rawalumbu Bekasi, Akardi pada tahun 2014. Mantan Camat Rawalumbu terbukti bersalah terkait kasus pemalsuan surat tanah saat camat tersebut menjabat sebagai lurah pejuang medan satria sekitar tahun 2004, tetapi kasusnya baru terungkap pada tahun 2014 ketika beliau menjabat sebagai camat Rawalumbu. Kasus seperti itu terjadi dikarenakan lemahnya penerapan pengawasan internal dan tata kelola yang baik disuatu instansi pemerintahan. Dengan adanya penerapan akuntansi sektor publik, tata kelola yang baik dan pengawasan pengelolaan keuangan mampu memperketat pengawasan internal yang dilakukan, sehingga tindakan yang mengarah ke tindak kecurangan atau tindakan yang dapat merugikan keberlangsungan organisasi tersebut dapat diminimalisir. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi

sektor publik, *Good Governance* dan pengawasan pengelolaan keuangan terhadap pencegahan fraud khususnya di kantor kecamatan Rawalumbu Bekasi.

Menurut penelitian terdahulu I Gade adi, dkk (2017) dalam penelitiannya salah satu variabel yang dapat mempengaruhi implementasi pencegahan Fraud yang terjadi salah satunya adalah pengendalian internal, *Whistleblowing System* dan Moralitas Aparat Pemerintahan dan variabel tersebut terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud yang terjadi di Dinas pekerjaan umum Kabupaten Buleleng. Sedangkan menurut Anantawikrama & Komang, (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa variabel lain yang dapat mempengaruhi implementasi Pencegahan Fraud yaitu Kompetensi Aparatur.

Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel independen yaitu Akuntansi sektor publik, *Good Governance*, dan Pengawasan pengelolaan keuangan dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu Pencegahan Fraud. Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah membuktikan secara empiris apakah variabel independen dalam penelitian ini dapat mempengaruhi variabel dependen di Kantor Kecamatan Rawalumbu Bekasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel independen akuntansi sektor publik, *Good Governance*, dan pengawasan pengelolaan keuangan, karena menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, peran akuntan publik memiliki dampak yang sangat luas dan peranan penting dalam era globalisasi. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa prinsip-prinsip pemerintahan yang baik mengikuti prinsip-prinsip umum pemerintahan.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa yang saat ini tertuang dalam Permendagri 73 tahun 2020 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, ketertiban dan disiplin anggaran, serta untuk ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Dari semua peraturan yang ada peneliti meyakini bahwa ketiga variabel tersebut sudah mewakili hampir keseluruhan gambaran kegiatan operasional sebuah organisasi/instansi/lembaga pemerintahan dalam mengimplementasikan Pencegahan Fraud yang terjadi. Sehingga jika penerapan Akuntansi sektor publik, good governance, dan pengawasan pengelolaan keuangan sudah di terapkan dengan baik maka akan semakin baik pula pencegahan Fraud yang terjadi dilingkungan instansi.

Pada penelitian ini Kantor Kecamatan Rawalumbu Bekasi merupakan objek penelitian yang akan diteliti karena saat ini Fraud yang terjadi dilingkungan organisasi/instansi/lembaga pemerintahan bukan lagi jadi rahasia umum salah satunya Kantor Kecamatan yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang masuk ke dalam Satuan kerja Perangkat daerah (SKPD) yang tidak luput dari isu-isu fraud. Diketahui bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 sampel yang diambil dari sebagian jumlah pegawai negeri yang bekerja di lingkungan kantor kecamatan rawalumbu bekasi.

Teori Entitas

Paton mengemukakan Teori entitas yang menunjukkan bahwa organisasi dianggap sebagai entitas ekonomi atau badan usaha yang mandiri, bertindak atas nama mereka, dan statusnya terpisah dari pemilik atau pihak lain. Dana diinvestasikan dalam organisasi dan entitas Pembelajaran menjadi fokus perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkaitan dengan laporan keuangan entitas bisnis, bukan pemiliknya.

Dengan kata lain, unit usaha menjadi entitas pelapor yang bertanggung jawab kepada pemilik. Departemen bisnis adalah pusat tanggung jawab, dan laporan keuangan adalah media tanggung jawab (Paton, 1962; Galang, 2020).

Menurut definisi Sujarweni (2021:1), akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai suatu kegiatan jasa yang meliputi pencatatan, pengkategorian, dan pelaporan peristiwa atau transaksi ekonomi yang pada akhirnya akan menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keputusan. Pelaporan keuangan yang berkualitas memerlukan sistem akuntansi yang memadai, karena sistem akuntansi merupakan penunjang pengelolaan keuangan daerah yang transparan, adil, bertanggung jawab, efektif dan efisien (Andy, 2021).

Hubungan antara akuntansi sektor publik dan kecurangan terletak pada kenyataan bahwa akuntansi sektor publik merupakan salah satu aspek pengawasan dan pelaksanaan audit. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya telah dilakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, lebih ditekankan pada upaya untuk mengidentifikasi penyimpangan atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dian & Hamidah (2020), yang menyatakan bahwa jika akuntansi sektor publik diterapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan, seperti kinerja, maka dapat mencegah akuntabilitas kecurangan di sektor publik di era digital. Dan disertai dengan penerapan metode pencegahan fraud, antara lain strategi teknis, metode dual-paradigma dan strategi pencegahan. Sehingga dari paparan di atas hipotesis yang di ajukan adalah:

H1: Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Tata pemerintahan yang baik adalah salah satu masalah yang paling menonjol dalam administrasi publik di akhir 1990-an. Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik oleh pemerintah sejalan dengan peningkatan terus menerus tingkat pengetahuan masyarakat di bawah pengaruh globalisasi. Model manajemen pemerintahan yang lama belum beradaptasi dengan tatanan sosial yang selalu berubah (Muh. Solikhudin, 2017).

Hubungan antara good governance dan pencegahan fraud dapat dilihat dari pernyataan Razaee dalam penelitiannya (Rita, 2014), yang menyatakan bahwa mengenai teori keagenan, ada pemisahan antara pemilik (principal) dan manajer perusahaan (agent), mengarah ke agency. Selain itu, pemisahan pemilik dan pengelola juga menyebabkan “asimetri informasi”, yaitu kondisi agen untuk mengakses informasi yang bukan milik prinsipal. Asimetri informasi terjadi ketika agen mengetahui lebih banyak tentang informasi internal dan prospek masa depan daripada yang diketahui oleh prinsipal dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu diterapkan tata kelola yang baik beserta prinsip dan mekanismenya untuk memastikan bahwa hak dan hubungan antara semua pemangku kepentingan terlindungi dan untuk meminimalkan terjadinya kecurangan. Sehingga dari paparan di atas hipotesis yang di ajukan adalah:

H2: *Good Governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Jika organisasi menerapkan pengendalian internal secara lebih efektif, kecurangan dapat dicegah. Bagian integral dari pengendalian internal adalah kegiatan pemantauan yang melibatkan evaluasi berkala atau berkelanjutan (Arens, 2003; I Gade, 2017). Pengendalian internal yang efektif akan membantu melindungi aset, memastikan tersedianya laporan keuangan dan manajemen

yang andal, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko kerugian, penyimpangan dan pelanggaran (Susanto, 2008; Igade, 2017)

Pengelolaan keuangan daerah adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan indikator yang ada seperti akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengendalian. Selanjutnya masyarakat dapat melakukan pengawasan dan pengawasan untuk menghindari dan mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah.

Hubungan antara pengawasan pengelolaan keuangan terhadap pencegahan fraud dapat dilihat dari Penelitian Fikri dkk dalam jurnal (Anantawikrama, dkk, 2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur dengan pemahaman akuntansi yang kurang menyebabkan pengelolaan keuangan tidak profesional sehingga berpotensi terjadi kecurangan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur harus bersinergi supaya dapat melakukan pencegahan terjadinya Fraud. Sehingga dari paparan di atas hipotesis yang di ajukan adalah:

H3: Pengawasan Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Pencegahan fraud.

METODE PENELITIAN

Obyek penelitian yang akan diteliti yaitu Akuntansi Sektor Publik, Good Governance dan pengawasan pengelolaan keuangan sebagai variabel bebas atau independen; Pencegahan Fraud sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini terdapat dalam table 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Definisi Oprasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Butir Instrumen
Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)	Karakteristik kualitatif laporan keuangan Entitas Pelaporan	Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.	PA 1
		Pengelolaan pelaporan	PA 5
		Pengendalian Pelaporan	PA 6
		Penguasaan entitas pelaporan	PA 7
		Laporan realisasi anggaran, neraca,	PA 8
		Laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan kinerja keuangan, dan laporan perubahan ekuitas.	
		Visi Strategis	PG 1
		Transparansi	PG 2
Penerapan Good Governance (X2)	Kemampuan	Responsivitas	PG 3
		Keadilan	PG 4
		Efektivitas dan Efesiensi	PG 5
		Akuntabilitas	PG 6
		Lingkungan Pengendalian	PP 1
		Aktivitas Pengendalian	PP 2
Pengawasan Pengelolaan Keuangan (X3)	Pengawasan Internal	Pemantauan	PP 3
Pencegahan Fraud (Y)	Lingkungan Pengendalian	Menciptakan kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu	PF 1
		Proses rekrutmen yang jujur	PF 2
		Fraud Awareness	PF 3
		Lingkungan Kerja yang positif	PF 4
		Kode etik yang jelas, mudah dimengerti dan ditaati	PF 5
		Adanya sanksi terhadap segala bentuk kecurangan	PF 6

Menurut Sony & Bagya dalam buku metodologi penelitian dan statistik (2017:71) populasi adalah merupakan keseluruhan objek/subjek penelitian, Itulah definisi populasi dalam penelitian. Dalam penelitian ini maka yang menjadi populasi adalah seluruh Pegawai Negri yang bekerja di lingkungan Kantor Kecamatan Rawalumbu Bekasi. Menurut Sony & Bagya dalam buku metodologi penelitian dan statistik (2017:71) Sampel merupakan sebagian atau wakil yang memiliki karakteristik

representasi dari populasi. Dalam penelitian ini PNS yang bekerja di lingkungan Kantor Kecamatan Rawalumbu Bekasi yang menjadi sampel responden.

Data dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Negri Sipil yang bekerja di Kantor Kecamatan Rawalumbu Bekasi. metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Non Probability*

Sampling yaitu teknik *Accidental Sampling*, yakni teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai sebagai sampel, jika dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok untuk dijadikan sebagai sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji asumsi klasik (tidak dibahas dalam paper ini) menyatakan tidak ada masalah normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas dan multikolinieritas. Sementara hasil uji goodness of Fit antara data dan model tersaji dalam table 3 yang merupakan hasil uji F.

Tabel 3 Hasil uji Kesesuaian data dan model

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	795.307	3	265.102	27.934	.000 ^b
Residual	303.693	32	9.49		
Total	1099	35			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y)

b. Predictors: (Constant), Pengawasan Pengelolaan Keuangan (X3), Akuntansi Sektor Publik (X1), Good Governance (X2)

Dari hasil perhitungan secara simultan pada tabel 3 diperoleh nilai signifikansi senilai 0,000. Dengan demikian antara data dan model dalam penelitian ini terdapat kesesuaian atau Fit. Bisa diartikan bahwa antara akuntansi sektor publik (X1), good governance (X2), pengawasan pengelolaan keuangan (X3) secara simultan mempengaruhi pencegahan fraud (Y).

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan adjusted R Square adalah Rsquare yang telah disesuaikan nilai ini selalu lebih kecil dari *R Square* bahkan dari angka ini bisa memiliki harga negatif, dimana untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan Adjusted R square koefisien determinasi.

Tabel 4 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.851 ^a	0.724	0.698	3.081

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Pengelolaan Keuangan (X3), Akuntansi Sektor Publik (X1), Good Governance (X2)

b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y)

Pada tabel 4 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R Square) yang diperoleh

sebesar 0,698. Hal ini berarti 68,9% pencegahan fraud dapat dijelaskan oleh variabel

akuntansi sektor publik, good governance, dan pengawasan pengelolaan keuangan, sedangkan sisanya yaitu 30,2% pencegahan fraud dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti oleh penelitian ini.

Uji Hipotesis

Untuk Uji Hipotesis disajikan dalam table 5.

Tabel 5 Koefisien Hasil Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.757	5.081		0.149	0.882
Akuntansi Sektor Publik (X1)	0.345	0.134	0.359	2.572	0.015
Good Governance (X2)	0.412	0.158	0.389	2.614	0.014
Pengawasan Pengelolaan Keuangan (X3)	0.238	0.103	0.25	2.306	0.028

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y)

Dapat dilihat variabel Akuntansi Sektor Publik memiliki nilai signifikan 0,015.

Sedangkan variabel Good Governance signifikan 0.014. Pengawasan Pengelolaan Keuangan bernilai signifikan. Berdasarkan tabel diatas, persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut

$$Y = 0,757 + 0,345 X1 + 0,412 X2 + 0,238 X3$$

Pengaruh Akuntansi sektor publik terhadap Pencegahan Fraud.

Hasil pengujian hipotesis pertama dapat dilihat Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara akuntansi sektor publik sebagai variabel X1 terhadap Pencegahan fraud sebagai variabel Y yang menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2,572 dengan signifikansi sebesar $0,015 < 0,05$ dan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,345. Oleh karena itu, hipotesis pertama penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Sehingga jika implementasi akuntansi sektor publik semakin baik, maka pencegahan fraud juga akan semakin baik. Jika organisasi menerapkan akuntansi sektor publik lebih

efektif, fraud dapat dicegah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memenuhi persyaratan keandalan, relevan, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan (Subaeti, 2018). Kualitas laporan keuangan yang baik memiliki dampak yang besar dalam mencegah terjadinya kecurangan. Memiliki laporan keuangan yang baik akan mendorong akuntabilitas atas laporan keuangan yang disusun. Oleh karena itu, fraud akan dipengaruhi oleh apakah ada peluang untuk melakukannya. Dengan menerapkan akuntansi sektor publik yang efektif, peluang ini dapat diminimalkan. Sebaliknya, jika penerapan akuntansi sektor publik yang ada lemah atau tidak efektif, akan memberikan peluang bagi pegawai untuk melakukan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Maka jika semakin tinggi penerapan akuntansi sektor publik akan semakin tinggi pula pencegahan fraud.

Secara empiris hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Subaeti (2018) yang mengkaji dampak penerapan Standar

pelaporan keuangan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi Bengkulu dengan variabel independen Standar pelaporan keuangan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas pelaporan keuangan dan variabel dependen akuntabilitas kinerja pemerintah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik berdampak pada akuntabilitas kinerja pemerintah untuk meminimalkan tingkat kecurangan.

Pengaruh Good Governance terhadap Pencegahan Fraud.

Hasil pengujian hipotesis kedua dapat dilihat Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara Good Governance sebagai variabel X2 terhadap Pencegahan fraud sebagai variabel Y menunjukan bahwa t hitung sebesar 2,614 dengan signifikansi sebesar $0,014 < 0,05$ dan hasil uji regresi berganda menunjukan nilai koefisien sebesar 0,412. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukan bahwa variabel Good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Jadi jika penerapan *Good Governance* semakin baik maka pencegahan fraud juga semakin baik. Pencegahan fraud dapat dilakukan apabila penerapan *Good Governance* semakin efektif diterapkan oleh organisasi. Menurut Solikhudin (2017) kinerja pemerintah ke depan dapat menjadi ukuran sejauh mana instansi dan pejabat pemerintah telah mewujudkan nilai-nilai good governance yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Menurut *World Bank Good governance* dapat berjalan efektif jika telah memenuhi prinsip-prinsip *Governance* yaitu 1) *Participation*, 2) *Fairness*, 3) *Accountability*, 4) *Transparency*, 5) *Effectiveness*, 6) *Efficiency*

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agung dan Mulyani (2020) yang meniti tentang pengaruh Good Governance dan latar belakang profesi kepala daerah terhadap kualitas laporan

keuangan dan kinerja pemerintah dengan variabel independen Good governance dan latar belakang profesi kepala daerah serta variabel dependen kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan good governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah.

Pengaruh Pengawasan Pengelolaan keuangan terhadap Pencegahan Fraud.

Hasil pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara Pengawasan pengelolaan keuangan sebagai variabel X3 terhadap Pencegahan fraud sebagai variabel Y menunjukan bahwa t hitung sebesar 2,306 dengan signifikansi sebesar $0,028 < 0,05$ dan hasil uji regresi berganda menunjukan nilai koefisien sebesar 0,238. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukan bahwa variabel Good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Jadi jika pengawasan pengelolaan keuangan semakin baik maka pencegahan fraud juga semakin baik. Pencegahan fraud dapat dilakukan apabila pengawasan pengelolaan keuangan semakin efektif diterapkan oleh organisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pedoman pengelolaan keuangan daerah meliputi kewenangan yang dapat merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan, pelaporan, dan pembukuan, dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Pengendalian internal dapat dikatakan baik, apabila dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang diharapkan, dipercaya oleh masyarakat, dengan memiliki pengawasan internal, maka suatu kegiatan akan lebih terkontrol dan kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, pengawasan akan mampu meningkatkan kinerja

pemerintah itu sendiri (Dea Rahma & Tri J, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dea Tri (2020) yang meniti tentang pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah dengan variabel independen pengelolaan keuangan dan pengawasan internal serta variabel dependen kinerja pemerintah. Dari hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara penerapan pengelolaan keuangan dan pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntansi sektor publik, Good Governance, dan pengawasan pengelolaan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan fraud. Hal tersebut dapat dilihat dari sekecil apapun perubahan yang terjadi pada Akuntansi sektor publik, Good Governance, dan pengawasan pengelolaan keuangan di lingkungan Kantor Kecamatan Rawalumbu Bekasi akan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Maka hasil hipotesis pertama, kedua, dan ketiga (H1, H2, H3) dapat diterimadkan hasil tersebut telah menjawab dari tujuan penelitian ini.
2. Berdasarkan dari hasil pengujian semua variabel yaitu akuntansi sektor publik, good governance dan pengawasan pengelolaan keuangan menjadi indikator dalam implementasi pencegahan fraud. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika penerapan peran akuntansi sektor publik yang dilakukan semakin baik dan efektif, maka semakin baik pula implementasi pencegahan fraud. Begitu juga dengan good governance dan pengawasan pengelolaan keuangan, jika penerapan good governance dan pengawasan pengelolaan keuangan

yang dilakukan semakin baik dan efektif, maka semakin baik juga implementasi pencegahan fraud.

3. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah untuk mempertimbangkan penerapan pencegahan fraud yang efektif di instansi atau lembaga pemerintah lainnya.

Saran

1. Pada lingkungan kantor kecamatan rawalumbu bekasi ditemukan bahwa penerapan akuntansi sektor publik yang saat ini dipegang oleh staff subag keuangan, serta penerapan good governance dan pengawasan pengelolaan keuangan telah diterapkan dengan baik namun masih ada yang perlu diperhatikan, untuk itu saran yang dapat peneliti berikan untuk kantor kecamatan rawalumbu bekasi yaitu masih perlu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk staff bagian keuangan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian, terutama dibidang akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik.
2. Dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan seperti objek yang tidak luas, populasi dan sampel yang sangat terbatas dan untuk itu perlu adanya perbaikan, terutama terkait dengan jumlah populasi, sampel dan variabel yang digunakan. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menambah jumlah populasi, sampel, dan objek penelitian yang lain tidak hanya di kantor kecamatan rawalumbu bekasi saja, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi. Para peneliti berikutnya juga dapat menambah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap pencegahan fraud seperti integritas, objektivitas, dan moralitas.
3. Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner, yaitu kemungkinan adanya

perbedaan kognitif antara peneliti dan yang diwawancarai, karena yang diwawancarai dan peneliti tidak dapat saling mengklarifikasi pertanyaan atau pernyataan satu sama lain. Oleh karena itu penelitian selanjutnya

tentunya menjadi lebih representatif apabila mengkombinasikan dengan metode wawancara sehingga persepsi responden atas pertanyaan atau pernyataan dapat diketahui secara mendalam.

REFERENCES:

- Anugrah, Rita, (2014). Peranan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Association of Certified Fraud Examiners, 2019. Survei Fraud Indonesia tahun 2019. ACFE Indonesia Chapter.
- Faisal, Sony & Bagya Mujianto, (2017). Metode Penelitian dan Statistik. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan: Bahan Ajar Teknologi laboratorium Medis (TLM)
- Fitriyadi Dharma Tilaar, Andy, (2021). Pengaruh Pendidikan dan pelatihan terhadap pemahaman akuntansi sektor publik di keuangan Rumah sakit Abdul Moloek Provinsi Lampung. *Journal of Accounting Taxing and Auditing*, 3(1).
- Gade adi Kusuma Wardana, I, dkk, (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System dan moralitas aparat terhadap pencegahan fraud padadinas pekerjaan umum kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi*, 8(2).
- Galang alam marwanta, (2020). Pengaruh good corporate governance dan struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan. Di unduh pada minggu 6 Juni 2021 pukul 08.45 <http://repository.stieykpn.ac.id/1025/1/Ringkasan%20Skripsi%20Galang%20Alam%20Marwanta-111628784.pdf>
- Kristiyani, Dian & Hamidah, (2020). "Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik untuk Mencegah Fraud pada Sektor Publik di era digital". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 22(2), 289-304.
- Mochammad Faishal, Agung & Sri Mulyani, (2020). "Pengaruh Good Governance dan latar belakang profesi kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah". *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 142-159.
- Rahma Novitasari, Dea & Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, (2020). "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal terhadap kinerja Pemerintahan". *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 1-8.
- Solikhudin, Muh, (2017). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Tinjauan hukum islam kontemporer. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 7(1). diakses tgl 6 juni 2021, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/447/410>
- Sujarweni, V. Wiratna, (2021). Akuntansi sektor publik, teori, konsep dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tungga Atmadja, Anantawikrama & Komang adi kurniawan saputra, (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12(1).
- Veny Marlana, Subaeti, (2018). Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu (Studi Kasus: BPKD, Inspektorat, DPMD Dan DPRD Di Provinsi Bengkulu). *Jurnal Ekonomi Unihaz*, 1(2), Sekretariat Dprd Provinsi Bengkulu.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan, diakses tgl 6 juni 2021 jam 10:41 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>

Permendagri 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa

<https://m.merdeka.com/peristiwa/terbukti-korupsi-mantan-camat-di-bekasi-dibekuk-di-jalanan.html>

diakses tanggal 03 juli 2021 jam 15.33

<https://www.inspektorat.waykanankab.go.id/detailpost/upaya-mendeteksi-kecurangan-fraud> diakses tgl 30 juni 2021 jam 13.49